

## **INFORMASI LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (ILPPD) KOTA SURABAYA TAHUN 2010**

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat, maka berikut disampaikan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (ILPPD) Kota Surabaya Tahun 2010 yang digunakan pemerintah sebagai dasar melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Surabaya tahun 2010 merupakan ringkasan dari Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dengan ruang lingkup pembahasan mencakup Penyelenggaraan Urusan Desentralisasi, Tugas Pembantuan serta Tugas Umum Pemerintahan.

### **A. GAMBARAN UMUM KOTA SURABAYA**

Kota Surabaya berada di 7° 9'–7° 21' Lintang Selatan dan 112° 36' – 112° 57' Bujur Timur, sebagian besar wilayahnya merupakan dataran rendah dengan ketinggian 3 – 6 meter di atas permukaan laut, sebagian lagi pada sebelah Selatan merupakan kondisi berbukit-bukit dengan ketinggian 25 - 50 meter di atas permukaan laut. Luas wilayah Kota Surabaya adalah 52.087 Ha, dengan luas daratan 33.048 Ha atau 63,45% dan selebihnya sekitar 19.039 Ha atau 36,55% merupakan wilayah laut yang dikelola oleh Pemerintah Kota Surabaya. Jumlah penduduk Kota Surabaya hingga Desember 2010 adalah sejumlah 2.928.894 jiwa. Komposisi penduduk kota Surabaya pada Tahun 2010 berdasarkan jenis kelamin adalah sebanyak 1.469.656 jiwa penduduk laki-laki (50,18%) dan 1.459.238 (49,82%) jiwa penduduk perempuan

Struktur ekonomi Surabaya masih ditopang oleh sektor tersier, yaitu sektor perdagangan, hotel dan restoran; sektor pengangkutan dan komunikasi; sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan serta sektor jasa-jasa dengan kontribusi terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sebesar 62,73% pada tahun 2010. Sektor perdagangan, hotel dan restoran merupakan sektor utama yang menopang perekonomian dengan kontribusi sebesar 38,96% dan merupakan sektor yang menyumbang PDRB paling besar dibandingkan dengan sektor-sektor yang lain. Hal ini mencerminkan bahwa Surabaya merupakan kota yang kondusif dalam iklim usaha dan perdagangan serta didukung oleh sarana prasarana yang memadai

Kota Surabaya dengan penduduk lebih kurang sebanyak 2,9 juta jiwa merupakan pasar dan potensi ekonomi yang potensial. Selain didukung oleh sektor tersier yang sangat besar

peranannya, Surabaya juga didukung oleh sektor sekunder dengan kontribusi total mencapai 37,18% pada tahun 2010. Sektor tersebut terdiri atas sektor industri pengolahan dengan kontribusi sebesar 27,21%, sektor listrik, gas dan air bersih sebesar 3,29% dan sektor konstruksi sebesar 6,68%. Perkembangan yang terjadi dalam sektor-sektor penggerak perekonomian kota tidak terlepas dari adanya dukungan masyarakat yang kondusif serta dukungan penuh dari Pemerintah Kota Surabaya.

Kondisi ekonomi daerah secara umum ditunjukkan antara lain oleh angka Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), inflasi dan investasi. PDRB Kota Surabaya ditinjau dari segi produksi, yaitu berasal dari total nilai tambah dari barang dan jasa yang dihasilkan unit-unit Produksi di Kota Surabaya dalam periode tertentu.

Trend pertumbuhan ekonomi di Surabaya mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Trend penurunan ini juga terjadi baik pada tingkat Jawa Timur maupun nasional. Besarnya pertumbuhan ekonomi Surabaya tahun 2010 sebesar 6,73% masih lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi Jawa Timur (6,67%) dan Nasional (6,1%). Hal ini menunjukkan bahwa kinerja ekonomi di Kota Surabaya membaik di tengah isu gejolak ekonomi global. Selain itu, dampak positif sebagai kota perdagangan terbesar kedua setelah DKI Jakarta, daya beli masyarakat di sini cukup tertolong dengan adanya persaingan antar usaha, sehingga masyarakatnya dapat mengkonsumsi barang atau jasa yang lebih murah dibandingkan dengan daerah lainnya.

Peranan sektoral pada tahun 2010 tertinggi ada pada Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran serta Sektor Industri Pengolahan. Peranan Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran berkontribusi sebesar 38,96%, sedangkan peranan Sektor Industri Pengolahan adalah sebesar 27,21%. Peranan sektor lainnya tidak berpengaruh sebesar kedua sektor tersebut, pada Sektor Pengangkutan dan Komunikasi pada tahun 2010 sebesar 10,40%. Sektor yang peranannya sangat kecil adalah Sektor Pertambangan dan Penggalan (0,01%), sedangkan Sektor Pertanian (0,07%)

## **B. RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH**

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Surabaya tahun 2010 merupakan tahun kelima pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Surabaya Tahun 2006 –2010, dengan visi **SURABAYA CERDAS DAN PEDULI** atau *Surabaya Smart and Care*. Untuk mewujudkan visi tersebut, telah ditetapkan 8 misi pembangunan yang harus ditempuh, yaitu:

1. Mewujudkan pemerintahan yang demokratis, berkeadilan, transparan dan akuntabel.
2. Meningkatkan akselerasi pertumbuhan arus perdagangan barang dan jasa dalam skala regional maupun internasional serta memadukan wilayah *Greater Surabaya* dalam suatu sistem tata ruang yang terintegrasi didukung infrastruktur, sistem transportasi dan sistem

IT yang memadai.

3. Meningkatkan iklim yang kondusif bagi pengembangan koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah, investasi serta menciptakan keterpaduan antara pengusaha kecil, menengah dengan pengusaha besar.
4. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan sosial masyarakat.
5. Mewujudkan penataan lingkungan kota yang bersih sehat, hijau dan nyaman.
6. Meningkatkan kualitas pendidikan yang berwawasan global dan terjangkau bagi warga kota serta menyiapkan generasi muda yang siap menghadapi tantangan kemajuan zaman.
7. Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan yang terjangkau bagi masyarakat kota serta meningkatkan pemahaman masyarakat tentang lingkungan sehat dan perilaku sehat.
8. Menggali dan meningkatkan khasanah budaya lokal serta mengembangkan kehidupan kemasyarakatan yang harmonis dan bertoleransi.

## **C. PENYELENGGARAAN URUSAN DESENTRALISASI**

### **1. Penyelenggaraan Urusan Wajib Pendidikan dan Perpustakaan**

Urusan Wajib Pendidikan dan Perpustakaan diimplementasikan melalui Program Penyelenggaraan Pendidikan. Sasaran dari program ini adalah meningkatnya pencapaian Standar Pelayanan Minimal dan meningkatnya pemerataan pada semua jenjang pendidikan, dengan rincian sebagai berikut:

#### **a. Peningkatan Standar Pelayanan Minimal Pendidikan**

Pencapaian sasaran untuk meningkatkan Standar Pelayanan Minimal Pendidikan, diukur dengan menggunakan 3 (tiga) indikator kinerja, yaitu:

##### **1) Persentase Angka kelulusan**

Angka kelulusan dihitung berdasarkan jumlah siswa pada setiap jenjang pendidikan yang lulus dibandingkan dengan jumlah seluruh siswa yang mengikuti ujian tingkat akhir.

##### **a) Angka Kelulusan SD/MI**

Pada tahun 2010, jumlah siswa pada jenjang pendidikan SD/MI yang mengikuti ujian tingkat akhir sebanyak 41.952 siswa, sedangkan yang dinyatakan lulus sebanyak 41.952 siswa atau 100%, sehingga capaian kinerjanya mencapai 100,42% dari target yang telah ditetapkan sebesar 99,58%.

##### **b) Angka Kelulusan SMP/MTs**

Pada tahun 2010, jumlah siswa pada jenjang pendidikan SMP/MTs yang mengikuti ujian tingkat akhir sebanyak 37.634 siswa, sedangkan yang dinyatakan lulus sebanyak 37.101 siswa atau 98,58%, sehingga capaian

kinerjanya mencapai 98,67% dari target yang telah ditetapkan sebesar 99,91%

c) *Angka Kelulusan SMA/SMK/MA*

Pada tahun 2010, jumlah siswa pada jenjang pendidikan SMA/SMK/MA yang mengikuti ujian tingkat akhir sebanyak 34.462 siswa, sedangkan yang dinyatakan lulus sebanyak 34.347 siswa atau 99,67%, sehingga capaian kinerjanya mencapai 100,58% dari target yang telah ditetapkan sebesar 99,10%.

**2) Persentase Kompetensi guru**

Kompetensi guru dihitung berdasarkan jumlah guru yang memenuhi standar kompetensi akademik dibandingkan jumlah seluruh guru pada setiap jenjang pendidikan :

a) *Kompetensi Guru SD/MI*

Pada tahun 2010, jumlah guru pada jenjang pendidikan SD/MI sebanyak 13.809 guru, sedangkan yang memenuhi standar kompetensi akademik sebanyak 8.215 guru atau 59,49%, sehingga capaian kinerjanya mencapai 74,87% dari target yang telah ditetapkan sebesar 79,46%.

b) *Kompetensi Guru SMP/MTs*

Pada tahun 2010, jumlah guru pada jenjang pendidikan SMP/MTs sebanyak 7.399 guru, sedangkan yang memenuhi standar kompetensi akademik sebanyak 6.198 guru atau 83,77%, sehingga capaian kinerjanya mencapai 90,24% dari target yang telah ditetapkan sebesar 92,83%.

c) *Kompetensi Guru SMA/SMK/MA*

Pada tahun 2010, jumlah guru pada jenjang pendidikan SMA/SMK/MA sebanyak 7.112 guru, sedangkan yang memenuhi standar kompetensi akademik sebanyak 6.057 guru atau 85,17%, sehingga capaian kinerjanya mencapai 119,60% dari target yang telah ditetapkan sebesar 71,21%.

**3) Persentase Siswa kejuruan yang diterima bekerja**

Pada tahun 2010, jumlah siswa kejuruan yang lulus ujian tingkat akhir sebanyak 14.965 siswa, sedangkan yang diterima bekerja sebanyak 11.074 siswa atau 74% yang sebagian besar bergerak di bidang usaha industri. Dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan sebesar 70,00%, maka capaian kinerjanya mencapai 105,71%.

**b. Peningkatan Pemerataan Pada Semua Jenjang Pendidikan**

Pencapaian sasaran untuk meningkatkan pemerataan pada semua jenjang pendidikan, diukur dengan menggunakan 4 (empat) indikator kinerja, yaitu:

**1) Persentase Angka melek huruf**

Angka melek huruf dihitung berdasarkan jumlah penduduk usia 15 tahun keatas yang bisa membaca dan menulis dibandingkan dengan jumlah seluruh penduduk usia 15 tahun keatas. Pada tahun 2010, jumlah penduduk Kota Surabaya dengan usia 15 tahun keatas tercatat sebanyak 2.300.379 jiwa, sedangkan jumlah penduduk dengan usia tersebut yang bisa membaca dan menulis sebanyak 2.300.059 jiwa atau 99,99%. Dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan sebesar 97,30% maka capaian kinerjanya mencapai 102,76%

**2) Persentase Angka Partisipasi Murni**

Angka Partisipasi Murni dihitung berdasarkan jumlah siswa pada setiap jenjang pendidikan yang berusia 7 sampai dengan 18 tahun dibandingkan dengan jumlah penduduk yang berusia 7 sampai dengan 18 tahun.

*a) Angka Partisipasi Murni SD/MI*

Pada tahun 2010, jumlah penduduk usia 7 sampai dengan 12 tahun sebanyak 248.583 jiwa, sedangkan yang bersekolah pada jenjang pendidikan SD/MI sebanyak 231.052 siswa atau 92,95%, sehingga capaian kinerjanya mencapai 101,14% dari target yang telah ditetapkan sebesar 91,90%.

*b) Angka Partisipasi Murni SMP/MTs*

Pada tahun 2010, jumlah penduduk usia 13 sampai dengan 15 tahun sebanyak 98.552 jiwa, sedangkan yang bersekolah pada jenjang pendidikan SMP/MTs sebanyak 88.700 siswa atau 90,00%, sehingga capaian kinerjanya mencapai 112,56% dari target yang telah ditetapkan sebesar 79,96%.

*c) Angka Partisipasi Murni SMA/SMK/MA*

Pada tahun 2010, jumlah penduduk usia 16 sampai dengan 18 tahun sebanyak 82.280 jiwa, sedangkan yang bersekolah pada jenjang pendidikan SMA/SMK/MA sebanyak 67.575 siswa atau 82,13%, sehingga capaian kinerjanya mencapai 101,91% dari target yang telah ditetapkan sebesar 80,59%.

### **3) Persentase Angka Partisipasi Kasar**

Angka Partisipasi Kasar dihitung berdasarkan jumlah seluruh siswa pada setiap jenjang pendidikan dibandingkan dengan jumlah penduduk yang berusia 7 sampai dengan 18 tahun.

#### *a) Angka Partisipasi Kasar SD/MI*

Pada tahun 2010, jumlah penduduk usia 7 sampai dengan 12 tahun sebanyak 248.583 jiwa, sedangkan jumlah seluruh siswa pada jenjang pendidikan SD/MI sebanyak 261.509 siswa atau 105,20%, sehingga capaian kinerjanya mencapai 100% dari target yang telah ditetapkan sebesar 105,20%.

#### *b) Angka Partisipasi Kasar SMP/MTs*

Pada tahun 2010, jumlah penduduk usia 13 sampai dengan 15 tahun sebanyak 98.552 jiwa, sedangkan jumlah seluruh siswa pada jenjang pendidikan SMP/MTs sebanyak 103.480 siswa atau 105,00%, sehingga capaian kinerjanya mencapai 105,00% dari target yang telah ditetapkan sebesar 100%

#### *c) Angka Partisipasi Kasar SMA/SMK/MA*

Pada tahun 2010, jumlah penduduk usia 16 sampai dengan 18 tahun sebanyak 82.280 jiwa, sedangkan jumlah seluruh siswa pada jenjang pendidikan SMA/SMK/MA sebanyak 86.390 siswa atau 105,00%, sehingga capaian kinerjanya mencapai 97,12% dari target yang telah ditetapkan sebesar 108,11%.

### **c. Jumlah SD/MI dan SMP/MTs Negeri Yang Membebaskan SPP dan Uang Pangkal**

Sebagai upaya pemerataan pendidikan, Pemerintah Kota Surabaya memberikan bantuan operasional sekolah dan beasiswa bagi Anak Usia Sekolah Kurang Mampu (AUSKM). Pada tahun 2010, Pemerintah Kota Surabaya telah menyediakan dana untuk Biaya Operasional Pendidikan (BOPDA) sebagai pendamping dana BOS untuk 542 sekolah negeri dengan rincian, Sekolah Dasar sebanyak 487 sekolah, Madrasah Ibtidaiyah sebanyak 2 sekolah, Sekolah Menengah Pertama sebanyak 49 sekolah dan Madrasah Tsanawiyah sebanyak 4 sekolah. Disamping memberikan BOPDA pada sekolah negeri, Pemerintah Kota juga memberikan BOPDA kepada 722 sekolah swasta dengan rincian, SD/MI sebanyak 453 sekolah dan SMP/MTs sebanyak 269 sekolah. Dana BOPDA tersebut diberikan kepada 264.578 siswa SD/MI Negeri maupun Swasta, 109.986 siswa SMP/MTs Negeri maupun swasta, 106.960 siswa SMA/MA yang tidak

mampu dan 54.416 siswa SMK Negeri maupun swasta. Dengan demikian, jumlah SD/MI dan SMP/MTs Negeri yang telah membebaskan SPP dan uang pangkal sebanyak 542 sekolah, sehingga capaian kinerjanya mencapai 88,42% dari target yang telah ditetapkan sebesar 613 sekolah. Tidak tercapainya target tersebut dikarenakan banyak lembaga SD yang merger sehingga jumlah lembaga menjadi berkurang.

## **2. Penyelenggaraan Urusan Wajib Kesehatan dan Keluarga Berencana dan Keluarga sejahtera**

Urusan Wajib Kesehatan serta Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera diimplementasikan melalui **Program Penanganan Bidang Kesehatan dan Keluarga Berencana**. Sasaran dari program ini adalah meningkatnya derajat kesehatan masyarakat. Pencapaian sasaran tersebut diukur dengan menggunakan 4 (empat) indikator kinerja, yaitu:

### **1) Angka kematian bayi per-1000 kelahiran hidup**

Angka kematian bayi per 1.000 kelahiran hidup menggambarkan jumlah kematian bayi pada setiap 1.000 kelahiran. Angka kematian bayi di kota Surabaya pada tahun 2010 sebesar 7,84 per 1.000 kelahiran hidup. Angka tersebut menunjukkan bahwa, terjadi 320 kematian bayi dari 40.804 jumlah kelahiran hidup. Dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan yaitu < 10 per 1.000 kelahiran hidup, maka capaian kinerjanya mencapai 100 %.

### **2) Angka Kematian Ibu Melahirkan per-100.000 Persalinan Hidup**

Angka kematian ibu melahirkan per 100.000 kelahiran hidup menggambarkan jumlah kematian ibu melahirkan pada setiap 100.000 kelahiran hidup. Angka kematian ibu melahirkan di Kota Surabaya pada tahun 2010 sebesar 71,07 per 100.000 kelahiran hidup. Angka tersebut menunjukkan bahwa, terjadi 29 kematian ibu melahirkan dari 40.804 jumlah kelahiran hidup. Dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan yaitu < 125 per 100.000 kelahiran hidup, maka capaian kinerjanya mencapai 100%.

### **3) Persentase Balita Dengan Status Gizi Buruk**

Balita dengan status gizi buruk dihitung berdasarkan berat badan balita dibandingkan dengan tinggi badan balita (BB/TB). Berdasarkan hasil pendataan pada tahun 2010, terdapat 546 balita yang memiliki status gizi buruk atau 0,95% dari 57.477 balita yang ditimbang (diukur). Dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan sebesar  $\leq 1\%$ , maka capaian kinerjanya mencapai 100 %.

#### **4) Angka kematian kasar**

Pada tahun 2010, jumlah penduduk di Kota Surabaya sebanyak 2.928.894 jiwa, sedangkan jumlah penduduk yang meninggal sebanyak 12.151 jiwa, sehingga angka kematian kasar tercatat sebesar 0,41%. Dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan sebesar 0,38%, maka capaian kinerjanya mencapai 78,9%.

### **3. Penyelenggaraan Urusan Wajib Lingkungan Hidup**

Urusan Wajib Lingkungan Hidup diimplementasikan melalui 3 (tiga) program, yang meliputi :

#### **a. Program pengendalian dan pelestarian lingkungan hidup**

Program ini dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup perkotaan, sehingga menjadi lebih sehat dan lebih nyaman untuk dihuni. Sasaran dari program ini adalah meningkatnya kualitas lingkungan kota dengan indikator sasaran sebagai berikut:

##### **1) Persentase Kualitas Udara Yang Layak Hirup**

Kualitas udara yang layak hirup ditunjukkan dengan jumlah hari dengan kualitas udara baik dan sedang. Pada tahun 2010, kualitas udara baik adalah 44 hari dan kualitas udara sedang adalah 292 hari, sehingga kualitas udara yang layak hirup adalah 336 hari atau 98,82% dari 340 hari dalam setahun. Dibandingkan dengan target indikator sasaran yang telah ditetapkan sebesar 96% dalam setahun, maka capaian kinerja terhadap peningkatan kualitas udara yang layak hirup hanya mencapai 102,94%.

##### **2) Kualitas air**

Kualitas air ditunjukkan dengan jumlah sampel air sumur yang memenuhi nilai baku mutu berdasarkan parameter fisika kimia sebagaimana Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor: 416/MENKES/PER/IX/90 tentang Syarat-Syarat dan Pengawasan Kualitas Air. Pada tahun 2010, jumlah sumur yang dijadikan sampel untuk menilai kualitas air sebanyak 428. sampel air sumur dari jumlah sumur yang ada di Kota Surabaya sebanyak 116.968 unit. Dari 428 air sumur yang dijadikan sampel tersebut, terdapat 290 sampel air sumur yang memenuhi nilai baku mutu, sehingga jika dibandingkan dengan total sumur yang ada ditambah dengan peningkatan kualitas air yang memenuhi baku mutu 0,5% tiap tahunnya maka nilai baku mutu kualitas air tahun 2010 menghasilkan angka 20,9%. Dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan sebesar 20,5%, maka capaian kinerjanya adalah 101,95%

### **3) Jumlah perusahaan yang memiliki IPAL**

Indikator ini digunakan untuk mengukur tingkat ketaatan penanggungjawab suatu usaha/kegiatan di sektor industri terhadap pengelolaan lingkungan hidup, yaitu dengan membangun Instalasi Pengolah Air Limbah (IPAL) untuk mengelola limbahnya sebelum dibuang ke perairan umum dan pemahaman aturan tentang pengelolaan lingkungan hidup. Jumlah usaha industri di Kota Surabaya sampai dengan tahun 2010 sebanyak 519 perusahaan, dari 519 perusahaan industri tersebut, yang memiliki IPAL sebanyak 149 perusahaan atau bertambah 2 perusahaan dari 147 perusahaan pada tahun 2009. Dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan pada tahun 2010 sebesar 147 perusahaan, maka capaian kinerjanya mencapai 101,36%.

#### **b. Program Ruang Terbuka Hijau dan Pertamanan Kota**

Program ini dimaksudkan untuk meningkatkan keindahan lingkungan kota dan sekaligus mendukung pelestarian lingkungan kota. Sasaran dari program ini adalah meningkatnya ruang terbuka hijau kota dengan indikator sasaran luasan ruang terbuka hijau yang dikelola Pemerintah Kota. Ruang terbuka hijau yang dikelola Pemerintah Kota Surabaya sampai dengan tahun 2010 seluas 388.34 Ha dan bila dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan seluas 280.24 Ha, maka capaian kinerjanya mencapai 138.57 %.

#### **c. Program pengelolaan kebersihan kota**

Program Pengelolaan Kebersihan Kota dimaksudkan untuk meningkatkan kebersihan dan kesehatan lingkungan kota agar sampah dapat dikelola dengan baik diantara masyarakat dan pemerintah. Sasaran dari program ini adalah meningkatkan kualitas pengelolaan sampah dan sumber sampah serta meningkatkan kapasitas Tempat Pembuangan Akhir (TPA), dengan indikator sasaran sebagai berikut

##### **1) Volume tumpukan sampah di TPS**

Pada tahun 2010 diharapkan sudah tidak ada lagi tumpukan sampah di 163 unit TPS di Surabaya. Akan tetapi sampai dengan akhir tahun masih terdapat tumpukan sampah dengan volume rata-rata per hari sebanyak 14 m<sup>3</sup>.

##### **2) Volume sampah yang masuk ke TPA**

Pada tahun 2010, volume sampah yang masuk ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sebanyak 1.241,8 ton per hari, sehingga capaian kinerjanya mencapai 129% dari target yang telah ditetapkan sebesar 1.765 ton per hari. Tercapainya target dari indikator sasaran ini dikarenakan meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya mengurangi sampah mulai dari sumbernya melalui pengelolaan sampah mandiri berbasis komunitas.

#### **4. Penyelenggaraan Urusan Wajib Pekerjaan Umum**

Urusan wajib Pekerjaan Umum dilaksanakan melalui program :

##### **a. Program Pengelolaan dan Pembangunan Jalan dan Jembatan,**

Program Pengelolaan dan Pembangunan Jalan dan Jembatan dimaksudkan untuk meningkatkan dan mengembangkan kemantapan fisik pembangunan jalan dan jembatan serta penambahan kapasitas jalan sehingga meningkatkan kelancaran lalu lintas. Sasaran dari program ini adalah *meningkatkan kapasitas infrastruktur jalan dan jembatan*.

Panjang jalan di Kota Surabaya sampai dengan tahun 2010 adalah 1.426,15 km dengan lebar jalan berkisar antara 3 meter sampai dengan 30 meter, sedangkan kapasitas jalan yang ada, rata-rata mencapai 229.473 satuan mobil penumpang per jam (smp/jam) dengan volume kendaraan rata-rata mencapai 160.124 satuan mobil penumpang per jam (smp/jam).

Berdasarkan data kapasitas jalan dan volume kendaraan tersebut, maka nilai derajat kejenuhan atau V/C ratio mencapai angka 0,707. Angka tersebut diartikan bahwa rata-rata kondisi jalan di Kota Surabaya dalam kondisi stabil dengan kecepatan rata-rata berkisar 30 km/jam sebagaimana Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 14 Tahun 2006 tentang Manajemen dan Rekayasa Lalu-lintas di Jalan. Dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan sebesar 0,8, maka capaian kinerjanya mencapai 111,63 %.

Meskipun V/C ratio telah mencapai angka 0,707, namun masih terdapat beberapa jalan strategis di Kota Surabaya yang tingkat derajat kejenuhannya mencapai angka 0,9 sampai > 1,00 dengan kecepatan rata-rata < 15 km/jam. Jalan-jalan strategis tersebut antara lain Jalan Ahmad Yani (Waru), Jalan Tandes, Jalan Raya Wonokromo dan Jalan Urip Sumoharjo.

##### **b. Program Pengelolaan Utilitas Perkotaan**

Program Pengelolaan Utilitas Perkotaan dimaksudkan untuk mengatur pemanfaatan utilitas perkotaan seperti listrik, telepon, air dan lain-lain sehingga diperoleh keterpaduan pembangunan. Sasaran dari program ini adalah perluasan jaringan dan pemasangan Penerangan Jalan Umum (PJU) dengan indikator sasaran adalah *jumlah titik PJU yang dipasang*. Jumlah titik PJU yang terpasang sampai dengan tahun 2010 sebanyak 55.317 titik atau mengalami peningkatan sebanyak 5.634 titik dari tahun 2009, sehingga capaian kinerjanya mencapai 153,71% dari target yang telah ditetapkan sebanyak 35.988 titik.

### **c. Program Pengendalian Banjir dan Pengamanan Pantai**

Program Pengendalian Banjir dan Pengamanan Pantai dimaksudkan untuk mencegah dan mengantisipasi adanya ancaman bahaya banjir serta menanggulangi banjir di perkotaan. Sasaran dari program ini adalah menurunnya ancaman bahaya banjir. Pemerintah Kota Surabaya berupaya untuk selalu mengendalikan banjir dengan menekan luas area genangan, lama genangan dan tinggi genangan akibat banjir. Untuk mengukur penurunan ancaman bahaya banjir, digunakan 3 (tiga) indikator kinerja sebagai berikut:

#### **1) Penurunan Luas Area Genangan**

Penurunan luas area genangan diukur berdasarkan selisih luas area genangan pada tahun 2010 dengan luas area genangan pada tahun 2009. Luas area genangan di Kota Surabaya pada tahun 2010 sebesar 2486 Ha. Dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan sebesar 2000 Ha, maka capaian kinerjanya mencapai 75,7%. Luas area genangan pada tahun 2010 mengalami kenaikan sebesar 302,93 Ha dari 2183,07 Ha luas genangan yang terjadi pada tahun 2009.

#### **2) Penurunan Waktu Genangan Air**

Waktu genangan air diukur berdasarkan lamanya genangan air untuk surut. Lama genangan air di Kota Surabaya pada tahun 2010 mencapai 1,5 jam, sehingga capaian kinerjanya mencapai 125% dari target yang telah ditetapkan selama 2 jam. Namun jika dibandingkan dengan tahun 2009, rata-rata waktu genangan pada tahun 2010 lebih besar dari rata-rata waktu genangan 0,98 jam pada tahun 2009.

#### **3) Penurunan tinggi genangan**

Rata-rata tinggi genangan di Kota Surabaya pada tahun 2010 adalah sebesar 25 cm, sehingga capaian kinerjanya mencapai 75 % dari target yang telah ditetapkan sebesar 20 cm. Apabila dibandingkan dengan tahun 2009, rata-rata tinggi genangan pada tahun 2010 lebih besar dari rata-rata tinggi genangan 20 cm pada tahun 2009

### **d. Program pembangunan dan peningkatan fasilitas/gedung pemerintahan dan pemerintah daerah**

Program tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan fungsi prasarana dan sarana gedung dan bangunan pemerintah, termasuk sekolah, puskesmas, kantor kelurahan, dan lain-lain melalui pemeliharaan dan pengadaan fasilitas dan gedung pemerintahan. Sasaran dari program ini adalah meningkatnya ketersediaan sarana penyelenggaraan pemerintahan. Program ini terdiri dari 2 indikator yaitu :

**1) Jumlah gedung pemerintah yang dibangun/diperbaiki**

Dengan demikian sampai dengan Tahun 2010 jumlah gedung yang diperbaiki/direhabilitasi adalah sebanyak 3.304 gedung. Sedangkan target yang ditetapkan sebanyak 3.324 gedung, maka capaian indikator program tersebut adalah sebesar 99.40%.

**2) Jumlah fasum/fasos yang dikelola**

Luas fasilitas umum dan fasilitas sosial yang dikelola Pemerintah Kota Surabaya pada tahun 2010 adalah sebesar 438,69 Ha sedangkan target yang ditetapkan seluas 267,17 Ha, sehingga capaian kinerja indikator program tersebut adalah 164,20 %.

**5. Penyelenggaraan Urusan Wajib Penataan Ruang**

Urusan wajib Penataan Ruang diimplementasikan melalui Program Penataan Ruang. Sasaran dari program ini adalah tersusunnya rencana tata ruang kota yang aplikatif dan berwawasan lingkungan serta terlaksananya pengendalian pembangunan secara terpadu dan intensif. Pencapaian sasaran tersebut diukur dengan menggunakan 2 (dua) indikator kinerja, yaitu:

**1) Jumlah RDTRK & RTRK pada seluruh wilayah kota Surabaya**

Pada tahun 2010, jumlah RDTRK yang tersusun sebanyak 3 Unit Pengembangan (UP) yaitu UP. Rungkut, UP. Akhmad Yani dan UP. Tanjung Perak, sehingga capaian kinerjanya mencapai 100% dari target yang telah ditetapkan sebanyak 3 UP. Sedangkan jumlah RTRK yang tersusun sebanyak 5 Unit Distrik (UD) yaitu kawasan Pantai Timur Sebelah Utara, UD Bulak- Kalikedinding, Kawasan Lantamal, UD Mulyorejo dan UD. Pakal Bagian Timur sehingga capaian kinerjanya mencapai 83 % dari target yang telah ditetapkan sebanyak 6 UD.

**2) Jumlah IMB sesuai Rencana Tata Ruang yang dikeluarkan**

Jumlah bangunan yang memiliki ijin sampai dengan tahun 2010 sebanyak 390.061 unit atau mengalami peningkatan sebanyak 6.802 unit dari tahun 2009 yang meliputi perijinan untuk hunian rumah tinggal sebanyak 5.363 unit dan non rumah tinggal sebanyak 1.439 unit, sehingga capaian kinerjanya mencapai 100,28% dari target yang telah ditetapkan sebanyak 388.952. unit.

**6. Penyelenggaraan Urusan Wajib Perencanaan Pembangunan**

Urusan Wajib Perencanaan Pembangunan diimplementasikan melalui Program Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan. Sasaran dari program ini adalah meningkatkan kualitas perencanaan dan pengendalian pembangunan dengan indikator sasaran persentase kegiatan yang sesuai waktu dan target perencanaan.

Pada tahun 2010, jumlah kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Surabaya sebanyak 1.789 kegiatan. Dari seluruh kegiatan tersebut, realisasi pelaksanaan kegiatan yang dapat diselesaikan tepat waktu dan sesuai dengan target perencanaan adalah sebanyak 1.770 kegiatan, sehingga capaian kinerjanya mencapai 98,94%.

## **7. Penyelenggaraan Urusan Wajib Perumahan**

Urusan Wajib Perumahan diimplementasikan melalui 2 (dua) program yaitu, Program Perumahan dan Permukiman, Program pencegahan dan penanggulangan kebakaran. Program tersebut diuraikan sebagai berikut

### **a. Program perumahan dan permukiman**

Program Perumahan dan Permukiman dimaksudkan untuk penataan perumahan dan permukiman di perkotaan dan untuk mengurangi kekumuhan di kawasan berpenduduk padat. Sasaran dari program ini adalah meningkatnya kualitas permukiman dengan indikator sasaran luas lingkungan perumahan permukiman yang ditangani/dibenahi. Pada tahun 2010, luas lingkungan perumahan permukiman yang ditangani/dibenahi adalah 1019,45 Ha, sehingga capaian kinerjanya mencapai 50,97 % dari target yang telah ditetapkan sebesar 2.000 Ha.

### **b. Program pencegahan dan penanggulangan kebakaran**

Program Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dimaksudkan untuk mencegah dan menanggulangi adanya bahaya kebakaran. Sasaran dari program ini adalah penanganan kebakaran dengan indikator sasaran waktu tempuh unit pemadam kebakaran tiba di lokasi kebakaran dan penurunan jumlah kejadian kebakaran. Indikator sasaran tersebut diuraikan sebagai berikut:

#### **1) Waktu tempuh unit pemadam kebakaran tiba di lokasi kebakaran**

Indikator waktu tempuh unit pemadam kebakaran menggambarkan responsivitas unit pemadam kebakaran dalam menanggapi laporan kejadian kebakaran dari masyarakat. Waktu tempuh tersebut diukur berdasarkan waktu diterima pemberitahuan, waktu perjalanan dan waktu gelar peralatan di lokasi. Pada tahun 2010, rata-rata waktu tempuh unit pemadam kebakaran sampai lokasi kebakaran adalah 12 menit, sedangkan target yang ditetapkan adalah 15 menit, sehingga capaian kinerjanya sebesar 120 %.

#### **2) Penurunan jumlah kejadian kebakaran**

Pada tahun 2010 jumlah kejadian kebakaran mengalami penurunan yaitu sebanyak 176 kejadian, dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan yaitu sebanyak 200 kejadian, maka capaian kinerjanya sebesar 112 %

## **8. Penyelenggaraan Urusan Wajib Kepemudaan & Olahraga**

Urusan Wajib Pemuda dan Olahraga diimplementasikan melalui Program Peningkatan Pembinaan Kepemudaan dan Olahraga. Sasaran dari program ini meliputi:

### **1) Persentase Organisasi/pemuda yang berprestasi**

Pada tahun 2010, organisasi/pemuda yang dibina oleh Pemerintah Kota Surabaya sebanyak 2151 organisasi/pemuda. Dari jumlah tersebut, 212 pemuda atau 9,86% diantaranya mendapatkan prestasi. Dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan sebesar 5%, maka capaian kinerjanya mencapai 197,60%.

### **2) Persentase Organisasi/personil olahraga yang berprestasi**

Pada tahun 2010, terdapat 43 cabang olah raga yang dibina oleh Pemerintah Kota Surabaya. Dari 43 cabang olahraga tersebut, sebanyak 41 cabang olah raga mampu mencetak prestasi internasional maupun nasional. Terjadi peningkatan capaian sebanyak 3 cabang olahraga dari tahun 2009 atau meningkat sebesar 6,98%. Dibandingkan target yang telah ditetapkan sebesar 5%, maka capaian kinerjanya mencapai 139,6%.

## **9. Penyelenggaraan Urusan Wajib Koperasi & UKM, urusan Wajib Penanaman Modal dan Urusan Pilihan Perdagangan**

Urusan Wajib Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Penanaman Modal dan Urusan Pilihan Perdagangan diimplementasikan dalam 2 (dua) program yaitu program pengembangan koperasi, usaha mikro, kecil, menengah dan investasi serta program penataan dan atau pemberdayaan PKL. Program tersebut diuraikan sebagai berikut

### **a. Program Pengembangan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Investasi**

Pencapaian sasaran program ini diukur dengan menggunakan 6 (enam) indikator kinerja, yaitu :

#### **1) Persentase Penambahan jumlah PMA dan PMDN**

Jumlah PMA dan PMDN di Kota Surabaya sampai dengan tahun 2010 tercatat sebanyak 437 PMA dan 385 PMDN. Dalam hal ini terdapat penambahan investasi sebanyak 73 PMA dengan nilai Rp. 298.301.583.900 dan \$93.516.647 dan 10 PMDN dengan nilai investasi Rp 1.796.505.846.000. dari 364 PMA dan 375 PMDN pada tahun 2010, sehingga total penambahan PMA dan PMDN pada tahun 2010 sebanyak 83 perusahaan atau meningkat sebesar 11,23%. Dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan sebesar 5%, maka capaian kinerjanya persentase penambahan jumlah mencapai 224,63%.

**2) Jumlah usaha mikro binaan**

Jumlah usaha mikro binaan sampai dengan tahun 2010 sebanyak 10.292 unit atau mengalami peningkatan sebanyak 1.673 unit dari 8.619 unit pada tahun 2009. Dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan sebesar 1.585 unit, maka capaian kinerjanya mencapai 105,55%.

**3) Jumlah UKM tangguh**

UKM tangguh didefinisikan sebagai usaha kecil menengah dengan kriteria memiliki modal antara 25 – 200 juta, tenaga kerja sebanyak 3-5 orang, memiliki legalitas usaha berupa SIUP, TDI dan TDP serta mempunyai jangkauan pemasaran di tingkat lokal. Pada tahun 2010, jumlah UKM Tangguh yang terbentuk adalah sebanyak 10.861 UKM, dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan sebanyak 3.825 UKM Tangguh, maka capaian kinerjanya mencapai 283,95%.

**4) Jumlah UKM mandiri**

UKM mandiri didefinisikan sebagai usaha kecil menengah dengan kriteria memiliki modal lebih dari 200 juta, tenaga kerja lebih dari 5 orang, memiliki legalitas usaha berupa SIUP, TDI, TDP dan sertifikat merk/SP serta mempunyai jangkauan pemasaran sampai di tingkat regional/internasional. Pada tahun 2010, jumlah UKM Mandiri yang terbentuk adalah sebanyak 1.243 UKM, dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan sebanyak 1.460 UKM Tangguh, maka capaian kinerjanya mencapai 85,14%.

**5) Jumlah koperasi skor baik**

Indikator tersebut menggambarkan jumlah koperasi yang mempunyai skor baik, yang berarti kelembagaan maupun usahanya mampu untuk mandiri sehingga diharapkan dapat berdampingan bahkan bersaing dengan badan usaha yang lain. Jumlah koperasi dengan klasifikasi skor baik sampai dengan tahun 2010 mencapai 1.130 unit atau bertambah 41 unit dari 1.089 unit pada tahun 2009. Dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan sebanyak 1.130 unit, maka capaian kinerjanya mencapai 100%

**6) Persentase peningkatan kemitraan antara UMKM dengan pengusaha besar, lembaga perbankan dan lembaga keuangan**

Pada tahun 2010, kemitraan yang terjalin antara usaha mikro, kecil dan menengah dengan pengusaha besar/lembaga perbankan sebanyak 1 kemitraan, yaitu kemitraan berupa bantuan modal antara Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur dengan Iffa Sugiarti yang bergerak dalam usaha industri snack. Dengan demikian, bila dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan yaitu terjalannya 1 kemitraan, maka capaian kinerjanya mencapai 100%.

## **b. Program Penataan dan Pemberdayaan PKL**

Pedagang Kaki Lima (PKL) sampai dengan saat ini diakui merupakan sektor penyangga yang mampu menampung kelebihan tenaga kerja yang tidak dapat terserap di sektor formal. Intervensi Pemerintah untuk pemberdayaan PKL tercermin dari pelaksanaan program penataan dan atau pemberdayaan PKL.

Program Penataan dan atau Pemberdayaan PKL dimaksudkan untuk meningkatkan PKL yang dibina. Pencapaian sasaran tersebut diukur dengan indikator persentase PKL binaan.

Jumlah PKL yang telah dibina pada tahun 2010 sebanyak 1.935 PKL, sehingga sampai dengan tahun 2010 jumlah PKL binaan bertambah menjadi sebanyak 16,677 PKL. Dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan pada tahun 2010 sebesar 4.000 PKL, maka capaian kinerjanya hanya mencapai 48,38%. Namun demikian, secara akumulatif capaian kinerja program penataan dan pemberdayaan PKL selama lima tahun adalah sebesar 91,14%.

## **10. Penyelenggaraan Urusan Wajib Kependudukan & Catatan Sipil serta Urusan Pilihan Transmigrasi**

Urusan Wajib Kependudukan dan Catatan Sipil serta Urusan Pilihan Transmigrasi diimplementasikan melalui Program Peningkatan Pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Program ini mempunyai dua sasaran yang ingin dicapai oleh pemerintah Kota Surabaya, yaitu meningkatnya tertib administrasi kependudukan dan meningkatnya pelayanan administrasi kependudukan. Uraian dari kedua sasaran tersebut sebagai berikut:

### **a. Meningkatnya Tertib Administrasi Kependudukan**

#### **1) Penduduk ber-KTP**

Pada tahun 2010, penduduk ber-KTP di Kota Surabaya sebanyak 1.924.283 orang, sedangkan jumlah penduduk yang wajib ber-KTP berjumlah 2.232.046 jiwa, sehingga persentase penduduk ber-KTP sebesar 86%.

#### **2) Penduduk ber-KK**

Pada tahun 2010, jumlah keluarga yang ada sebanyak 818.677 keluarga, sedangkan yang telah memiliki Kartu Keluarga sebanyak 818.677 keluarga atau 100%.

#### **3) Bayi lahir ber-Akte Kelahiran**

Berdasarkan data dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, pada tahun 2010 terjadi kelahiran sebanyak 21.180 kelahiran. Dari jumlah tersebut yang memiliki akte kelahiran sebanyak 18.765 kelahiran atau 88,60%.

#### **4) Penduduk Meninggal Dunia ber-Akte Kematian**

Pada tahun 2010, jumlah laporan kematian dari kecamatan sebanyak 12.151 orang, sedangkan yang mengurus akte kematian sebanyak 4.591 orang atau hanya 37,78%.

#### **b. Meningkatnya Pelayanan Administrasi Kependudukan**

Peningkatan pelayanan administrasi kependudukan diukur berdasarkan kecepatan waktu pelayanan pengurusan KTP, KK, akte kelahiran dan akte kematian sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran dan Pencatatan Sipil, yang diuraikan sebagai berikut

##### **1) Rata-rata tenggang waktu penyelesaian pengurusan KTP**

Indikator ini menggambarkan kecepatan waktu yang dibutuhkan untuk mengurus KTP mulai dari memasukkan surat pengantar di Kecamatan hingga tercetaknya KTP. Waktu penyelesaian yang dibutuhkan untuk pengurusan KTP adalah 1 (satu) hari.

##### **2) Rata-rata tenggang waktu penyelesaian Kartu Keluarga**

Indikator ini menggambarkan kecepatan waktu yang dibutuhkan untuk mengurus Kartu Keluarga, mulai dari memasukkan surat pengantar di Kecamatan hingga tercetaknya Kartu Keluarga, dengan asumsi bahwa seluruh kelengkapan pendukungnya sudah memenuhi syarat. Waktu penyelesaian yang dibutuhkan untuk pengurusan KK adalah 5 (lima) hari.

##### **3) Rata-rata tenggang waktu penyelesaian Akte Kelahiran**

Indikator ini menggambarkan kecepatan waktu yang dibutuhkan untuk mengurus Akte Kelahiran, mulai dari memasukkan surat pengantar di Kecamatan hingga tercetaknya Akte kelahiran. Waktu penyelesaian yang dibutuhkan untuk pengurusan Akte Kelahiran adalah 6 (enam) hari.

##### **4) Rata-rata tenggang waktu penyelesaian Akte Kematian**

Indikator ini menggambarkan kecepatan yang dibutuhkan untuk mengurus Akte Kematian, mulai dari laporan kematian hingga tercetaknya Akte Kematian. Waktu penyelesaian yang dibutuhkan untuk mengurus Akte Kelahiran adalah 6 (enam) hari.

### **11. Penyelenggaraan Urusan Wajib Ketenagakerjaan**

Urusan Wajib Ketenagakerjaan diimplementasikan melalui Program Pelayanan Bidang Ketenagakerjaan sasaran dari program ini adalah meningkatkan perluasan kesempatan kerja dan perlindungan tenaga kerja. Pencapaian sasaran tersebut diukur dengan menggunakan 3 (tiga) indikator

kinerja, yaitu:

**1) Persentase Tingkat Kesempatan Kerja (TKK)**

Indikator tersebut menggambarkan persentase kesempatan kerja yang diukur berdasarkan perbandingan jumlah penduduk di atas usia 15 tahun yang bekerja dengan jumlah angkatan kerja usia di atas 15 tahun.

Pada tahun 2010, Pemerintah Kota Surabaya melalui Dinas Tenaga Kerja berhasil melakukan penempatan kerja sebanyak 9.662 orang tenaga kerja. Dengan penambahan penempatan kerja sebanyak 9.662 tenaga kerja tersebut, sampai dengan akhir tahun 2010 jumlah angkatan kerja > 15 tahun yang bekerja menjadi 1.245.542 orang. Apabila dibandingkan dengan jumlah angkatan kerja usia > 15 tahun pada tahun 2010 sebesar 1.336.932 orang, maka tingkat kesempatan kerja tahun 2010 adalah 93,16%. Dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan sebesar 93,91%, maka capaian kinerjanya mencapai 99,20%.

**2) Persentase Tingkat pengangguran terbuka**

Indikator tersebut menggambarkan persentase pengangguran terbuka yang diukur berdasarkan perbandingan jumlah penduduk di atas 15 tahun yang mencari kerja dengan jumlah angkatan kerja diatas 15 tahun. Jumlah angkatan kerja di atas usia 15 tahun yang merupakan penganggur terbuka pada tahun 2010 sebanyak 91.390 orang atau 6,84% dari jumlah angkatan kerja usia > 15 tahun sebanyak 1.336.932 orang pada tahun 2010. Dengan demikian, bila dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan sebesar 6,09%, maka capaian kinerjanya mencapai 87,68%.

**3) Terbentuknya kader K3**

Pembentukan Kader K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja) dimaksudkan sebagai pelopor untuk menurunkan angka kecelakaan kerja. Jumlah kader K3 yang telah terbentuk sampai dengan tahun 2010 sebanyak 1.010 kader atau bertambah sebanyak 10 kader dari 1.000 kader pada tahun 2009. Dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan sebesar 978 kader, maka capaian kinerjanya mencapai 103,27%.

**12. Penyelenggaraan Urusan Wajib Ketahanan Pangan dan Urusan Pilihan Pertanian dan Urusan Pilihan dan Urusan Pilihan Kelautan dan Perikanan**

Urusan Wajib Ketahanan Pangan dan Urusan Pilihan Pertanian dan Urusan Pilihan Kelautan dan Perikanan diimplementasikan melalui **Program Pengembangan Kelautan, Perikanan dan Pertanian**. Pencapaian sasaran dari program tersebut diukur dengan menggunakan 4 (empat) indikator kinerja, yang meliputi :

**1) Jumlah produktivitas hasil perikanan budidaya udang**

Indikator jumlah produktivitas hasil perikanan budidaya udang diukur berdasarkan hasil panen udang (Kg) dibandingkan dengan luas lahan pertanian udang (Ha). Pada tahun 2010, luas areal budidaya tambak di Kota Surabaya adalah 1.036 Ha dengan produksi 3.581.731 Kg sehingga produktivitas hasil perikanan budidaya udang adalah 864 Kg/Ha. Dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan sebesar 850 Kg/Ha, maka capaian kinerjanya 101,68 %

**2) Jumlah hasil peternakan yang diawasi (daging sapi, kambing, domba, babi & ayam)**

Pada tahun 2010 hasil peternakan yang diawasi baik berupa daging sapi, kambing, domba, babi, dan unggas sebanyak 68.953 ton. Dibandingkan dengan target yang ditetapkan sebesar 65.132,80 ton, maka capaian kinerjanya mencapai 105,87 %.

**3) Jumlah produktivitas hasil pertanian (padi)**

Pada tahun 2010, luas panen padi di Kota Surabaya adalah 2.810 Ha, jumlah produksi padi adalah 165,450 kwintal, sehingga produktivitas hasil pertanian (padi) adalah 56,51 kwintal/Ha. Dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan sebesar 51,89 kwintal/Ha, maka capaian kinerjanya adalah 108,90 %.

**4) Persentase ketersediaan bahan pangan**

Pada tahun 2010, jumlah kebutuhan bahan pangan khususnya beras bagi masyarakat Kota Surabaya sebanyak 247.838,07 ton, sedangkan jumlah bahan pangan (khususnya beras) yang mampu disediakan sebanyak 336.253,45 ton, sehingga persentase ketersediaan pangan adalah 135,67 %. Dibandingkan dengan target yang ditetapkan, yakni adanya kenaikan dalam ketersediaan bahan pangan sebesar 4% dari pencapaian tahun 2009 sebesar 133,84% maka capaian kinerjanya 45,75%

**13. Penyelenggaraan Urusan Wajib Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**

Urusan Wajib Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak diimplementasikan melalui *Program Peningkatan Kualitas Kehidupan dan Peran Perempuan serta Kesejahteraan dan Perlindungan Anak*. Sasaran dari program ini adalah menurunnya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak serta meningkatnya peran perempuan, dengan indikator sasaran sebagai berikut:

**1) Jumlah penanganan tindak kekerasan terhadap perempuan & anak**

Pencapaian sasaran tersebut diukur dengan menggunakan indikator jumlah penanganan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak. Pada tahun 2010, jumlah kasus tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak sebanyak 229 kasus yang seluruhnya ditangani oleh Pemerintah Kota Surabaya. Dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan sebesar 45 kasus, maka capaian kinerjanya mencapai 508,89 %.

**2) Jumlah organisasi perempuan yang dibantu**

Pencapaian sasaran tersebut diukur dengan menggunakan indikator jumlah organisasi perempuan yang dibantu. Jumlah organisasi perempuan yang ada di Kota Surabaya tahun 2010 sebanyak 85 lembaga. Pada tahun 2010, jumlah organisasi perempuan yang dibantu sebanyak 85 lembaga. Dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan sebesar 85 lembaga, maka capaian kinerjanya mencapai 100 %.

**14. Penyelenggaraan Urusan Wajib Perhubungan**

Urusan Wajib Perhubungan diimplementasikan melalui **Program Pengembangan Transportasi**. Program Pengembangan Transportasi dimaksudkan untuk meningkatkan pengelolaan sistem transportasi termasuk lalu lintas, pengaturan terminal, parkir dan angkutan umum. Sasaran dari program ini adalah meningkatkan prasarana pendukung dan manajemen transportasi. Pencapaian sasaran tersebut diukur dengan menggunakan 2 (dua) indikator kinerja, yaitu:

**1) Kecepatan rata-rata kendaraan**

Indikator kecepatan rata-rata kendaraan dimaksudkan untuk mengetahui kecepatan rata-rata kendaraan yang melintas di jalan umum Kota Surabaya, yang diukur berdasarkan rata-rata jarak tempuh dibandingkan waktu tempuh. Pada tahun 2010, kecepatan rata-rata kendaraan yang melintas di jalan umum Kota Surabaya mencapai 34.31 km/jam. Dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan sebesar 30 km/jam, maka capaian kinerjanya mencapai 114.37 %.

**2) Waktu tunggu penumpang**

Indikator waktu tunggu penumpang diukur berdasarkan jumlah angkutan umum per satuan waktu dibandingkan dengan jarak antar-halte dan terminal. Jumlah angkutan umum di Kota Surabaya sampai dengan tahun 2010 sebanyak 77 jenis trayek, terdiri dari 58 jenis trayek angkutan kota dengan 4.540 unit armada dan 19 jenis trayek bus kota dengan 228 unit armada. Untuk mengukur keberhasilan pencapaian rata-rata waktu tunggu penumpang digunakan

indikator kinerja rata-rata waktu tunggu penumpang angkutan umum, sehingga dengan tersedianya 77 jenis trayek angkutan umum di 4.768 unit armada, maka waktu tunggu penumpang pada tahun 2010 mencapai 11.78 menit. Dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan sebesar 15 menit, maka capaian kinerjanya mencapai 121.47 %.

#### **15. Penyelenggaraan Urusan Wajib Komunikasi & Informatika**

Urusan Wajib Komunikasi dan Informatika tersebut dilaksanakan melalui **Program Peningkatan kualitas pelayanan informasi publik**. Sasaran dari program ini adalah meningkatnya sarana penyaluran informasi dan aspirasi publik, dengan indikator persentase keluhan masyarakat yang ditindaklanjuti. Pada tahun 2010 terdapat 314 keluhan/aspirasi masyarakat yang disampaikan ke Pemerintah Kota Surabaya. Dari 314 aspirasi tersebut, yang telah ditindaklanjuti adalah 314 keluhan atau 100%. Dibandingkan dengan target sebesar 100%, maka capaian kinerja indikator tersebut adalah 100%.

#### **16. Penyelenggaraan Urusan Wajib Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri**

Urusan Wajib Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri diimplementasikan melalui

##### **a. Program Fasilitas Pemantapan Multikultur**

Program ini dimaksudkan untuk menciptakan keserasian hubungan antar unit sosial dan antar budaya dalam rangka memperkuat kerukunan warga kota. Sasaran dari program ini adalah meningkatnya penyelenggaraan kegiatan keagamaan dan forum antar kelompok masyarakat.

Pada tahun 2010, Pemerintah Kota Surabaya telah menyelenggarakan forum antar kelompok masyarakat dalam rangka penyelesaian masalah sosial kemasyarakatan sebanyak 44 kali atau meningkat sebesar 12,82% dibandingkan tahun 2009 (39 kali). Bila dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan sebesar 15% maka capaian kinerja pada Tahun 2010 sebesar 85,47%.

##### **b. Program penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat**

Program Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat memiliki sasaran meningkatnya ketertiban dan ketentraman masyarakat yang diukur dengan menggunakan indikator persentase penertiban terhadap pelanggaran Perda

Pada tahun 2010, jumlah pelanggaran Perda yang ditindaklanjuti di

Kota Surabaya sebanyak 63.114 obyek sedangkan jumlah pelanggaran Perda pada tahun 2009 sebanyak 61.714 obyek. Bila dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan sebesar 99,6% maka capaian kinerja pada Tahun 2010 sebesar 102,27%.

## **17. *Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian***

Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah dan Persandian diimplementasikan melalui 7 (tujuh) program, yaitu

### **a. Program peningkatan kinerja legislatif**

Program Peningkatan Kinerja Legislatif dimaksudkan untuk meningkatkan kinerja DPRD Kota Surabaya. Sasaran dari program ini adalah meningkatnya akuntabilitas dan kinerja legislatif. Untuk mengukur pencapaian sasaran tersebut dilakukan dengan menggunakan 3 indikator yaitu:

#### **1) Persentase Rancangan produk hukum yang dapat diselesaikan menjadi produk hukum**

Indikator tersebut menggambarkan tingkat produktivitas lembaga legislatif dan Pemerintah Kota dalam menghasilkan produk hukum berupa Peraturan Daerah. Tahun 2010, lembaga legislatif dan Pemerintah Kota dapat menyelesaikan 24 buah raperda yang disetujui DPRD dari 27 raperda yang diproses atau terealisasi 88.89%. Bila dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan sebesar 88% maka capaian kinerja pada Tahun 2010 sebesar 101%.

#### **2) Jumlah publik hearing yang dilaksanakan**

Dalam tahun 2010, ditargetkan melaksanakan 3 kali publik hearing. Sampai dengan tahun 2010 publik hearing yang dilaksanakan sebanyak 3 kali hearing/dialog yaitu dalam rangka Publik Hearing tentang Hearing / Dialog dgn Pakar / Narasumber masalah LKPJ akhir masa jabatan Kepala Daerah Kota Surabaya tahun 2006-2010, Hearing / Dialog dgn Pakar / Narasumber tentang persetujuan terhadap pelepasan hak atas tanah di Kel. Genteng, Hearing Dialog dgn Narasumber masalah Pengambil alihan Lahan Pemerintah Kota Surabaya ( KEBUN BIBIT ), Bila dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan pada tahun 2010 sebesar 3 kali publik hearing maka capaian kinerja pada Tahun 2010 sebesar 100%.

### **3) Persentase Keluhan masyarakat yang ditindaklanjuti**

Jumlah keluhan masyarakat yang diterima pada tahun 2010 sebanyak 152 keluhan. Dari jumlah keluhan tersebut sebanyak 125 keluhan telah ditindaklanjuti atau 82.24%. Bila dibandingkan target yang ditetapkan pada tahun 2010 sebesar 91% maka capaian kinerjanya sebesar 90.37%.

#### **b. Program peningkatan kapasitas keuangan daerah**

Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Daerah dimaksudkan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) dan penerimaan daerah lainnya, dengan indikator sasaran sebagai berikut:

##### **1) Persentase Peningkatan PAD**

Pendapatan Asli Daerah Kota Surabaya pada tahun 2010 dengan target APBD setelah PAK sebesar Rp.1.059.891.415.591,- terealisasi Rp. 894.139.182.245,- atau mencapai 84,36% dari target yang telah ditetapkan.

##### **2) Persentase Peningkatan Penerimaan Daerah Lainnya**

Penerimaan Daerah Lainnya Kota Surabaya pada tahun 2010 dengan target APBD setelah PAK sebesar Rp. 2.211.529.817.185 dan terealisasi Rp. 2.135.477.016.027 atau mencapai 96,56% dari target yang telah ditetapkan.

#### **c. Program peningkatan pengawasan dan akuntabilitas kinerja**

Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Kinerja dimaksudkan untuk meningkatkan kinerja dan akuntabilitas dari instansi pemerintah kota serta mendorong terwujudnya praktik pemerintahan yang baik dan bersih. Sasaran dari program ini adalah meningkatnya pengawasan dan akuntabilitas kinerja pemerintah. Pada tahun 2010, pelanggaran hukum dan disiplin aparatur Pemerintah Kota Surabaya yang terjadi sebanyak 108 kasus. Bila dibandingkan dengan jumlah pelanggaran tahun 2005 sebanyak 440 kasus maka indeks pelanggaran hukum dan disiplin aparatur adalah sebesar 24,54%. Bila dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan sebesar 39% maka capaian kinerja pada Tahun 2010 sebesar 137,08%

#### **d. Program pendayagunaan sumber daya aparatur**

Sasaran dari program ini adalah meningkatnya kualitas SDM aparatur. Pada tahun 2010, pegawai yang mengikuti Diklat sebanyak 2.971 pegawai yang terdiri dari Diklat teknis sebanyak 2.704 pegawai, Diklat struktural sebanyak 155 pegawai serta diklat fungsional sebanyak 112 pegawai. Dari jumlah pegawai yang mengikuti diklat sebanyak 2.719 peserta diklat telah melaksanakan tugas sesuai dengan diklat yang diikuti, atau sebanyak 91,52%.

Bila dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan sebesar 80% maka capaian kinerja pada Tahun 2010 sebesar 114,40%.

**e. Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan**

Sasaran dari program ini adalah meningkatnya tertib administrasi pemerintahan dengan indikator persentase urusan yang dilaksanakan Kecamatan. Pada tahun 2010, sebanyak 24 uraian urusan (80%) telah dilimpahkan ke Kecamatan. Dibandingkan dengan target yang ditetapkan sebesar 98,70 %, maka capaian kerjanya adalah 81,05%.

**f. Program pemanfaatan teknologi informasi**

Sasaran program ini adalah tersedianya pusat data dan informasi dalam sistem jaringan berbasis TI yang terintegrasi. Pencapaian sasaran tersebut dinilai melalui dua indikator, yaitu :

**1) Persentase Sistem pelayanan yang berbasis teknologi informasi yang terintegrasi**

Indikator tersebut mengukur sistem pelayanan berbasis teknologi informasi yang terintegrasi. Sampai dengan tahun 2010 ditetapkan target sebesar 100% atau setara dengan 31 sistem pelayanan yang terintegrasi. Target penambahan/pengintegrasian selama tahun 2010 adalah 14 sistem pelayanan. Pada tahun 2009 terdapat 40 sistem pelayanan yang terintegrasi dan dalam tahun 2010 terjadi penambahan/ pengintegrasian sebanyak 14 sistem. Dengan demikian total seluruhnya adalah 54 sistem pelayanan yang terintegrasi. Jumlah tersebut setara dengan 174,19%, maka capaian kerjanya sebesar 174,19%.

**2) Persentase SKPD yang mempunyai sistem data base yang terintegrasi**

Indikator ini ditujukan untuk mengukur integrasi sistem database antar SKPD yang ditujukan untuk meningkatkan efisiensi pemanfaatan data. Sampai dengan tahun 2010 ditetapkan target sebesar 100% atau setara dengan 37 sistem database yang terintegrasi pada 37 SKPD. Penambahan/pengintegrasian sistem database selama tahun 2010 terlaksana pada 5 SKPD dimana SKPD-SKPD tersebut telah tercatat dalam capaian tahun sebelumnya (2006-2010). Dengan demikian sistem data base pada 37 SKPD telah terintegrasi. Jumlah tersebut setara dengan 100% maka capaian kerjanya adalah 100%.

**g. Program peningkatan kualitas pelayanan perijinan**

Sasaran yang ingin dicapai dalam program ini adalah meningkatnya pelayanan perijinan secara mudah, cepat, dekat dan berkapasitas baik dalam hal biaya maupun sistem dan prosedurnya. Untuk menilai pencapaian sasaran tersebut dapat dilihat dari dua indikator sebagai berikut :

**1) Rata-rata tenggang waktu penyelesaian ijin**

Berdasarkan data yang ada, rata-rata penyelesaian perijinan untuk beberapa jenis ijin/surat yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Surabaya adalah < 7 hari Sehingga realisasi rata-rata penyelesaian ijin < 7 hari atau mencapai 100%.

**2) Jumlah kecamatan yang menerapkan pelayanan perijinan**

Pelayanan IMB telah didesentralisasikan ke beberapa kecamatan. Adapun perijinan yang diterapkan di Kecamatan adalah Surat Keterangan Rencana Kota (SKRK) dan atau IMB untuk bangunan tempat tinggal satu lantai dengan luas tanah  $\leq 200$  m<sup>2</sup>, mulai pemberkasan sampai dengan penerbitan IMB. Kecamatan yang telah menerapkan pelayanan perijinan sebanyak 31 kecamatan. Sedangkan target yang ditetapkan sebanyak 31 Kecamatan sehingga capaian kerjanya 100%.

**18. Penyelenggaraan Urusan Wajib Pemberdayaan Masyarakat & Desa**

Urusan Wajib Pemberdayaan Masyarakat Desa diimplementasikan melalui **Program Penanggulangan Kemiskinan**. Program ini dimaksudkan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat miskin dan meringankan beban bagi warga miskin dengan sasaran meningkatnya penanganan keluarga miskin kota. Pencapaian sasaran tersebut diukur dengan menggunakan 2 (dua) indikator kinerja, yaitu

**1) Persentase keluarga miskin yang mendapatkan pelayanan dasar**

Pelayanan dasar yang diberikan tersebut meliputi bantuan beras miskin (raskin) dan pelayanan kesehatan. Adapun capaian berdasarkan jenis pelayanan dasar yang diberikan adalah:

**a) Pelayanan Bantuan Beras Miskin (Raskin)**

Pada tahun 2010, keluarga miskin di Kota Surabaya yang mendapatkan pelayanan bantuan beras sebanyak 110.117 Rumah Tangga Miskin (RTM) didanai melalui APBN dengan total beras sebanyak 19.821.060 Kg. dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan sebesar 100 % dari jumlah keluarga miskin tahun 2005 sebanyak 111.223 KK yang mendapatkan bantuan beras miskin (raskin), maka capaian kerjanya

mencapai 99,01 %.

#### **b) Pelayanan Dasar Kesehatan**

Pelayanan dasar kesehatan yang diberikan kepada keluarga miskin didasarkan pada keluarga miskin yang memiliki. Jumlah keluarga miskin yang memiliki kartu jaminan kesehatan pada tahun 2010 sebanyak 458.622 Jiwa atau 111.223 KK. Setiap warga miskin yang memiliki kartu jaminan kesehatan akan mendapatkan akses pelayanan kesehatan secara gratis dari sarana kesehatan yang dimiliki Pemerintah. Capaian kinerja dari indikator ini mencapai 100 % dari target yang ditetapkan yaitu jumlah keluarga miskin pada tahun tahun 2005 sebanyak 111.223 KK.

#### **2) Persentase keluarga miskin yang mendapatkan pemberdayaan ekonomi**

Pada tahun 2010, keluarga miskin di Kota Surabaya yang mendapatkan pemberdayaan ekonomi sebanyak 30.566 KK. Dengan demikian, jumlah keluarga miskin yang mendapatkan pemberdayaan ekonomi sampai dengan akhir tahun 2010 mencapai 100.329 KK, jadi apabila dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan sebesar 59 % dari jumlah keluarga miskin tahun 2005 sebanyak 111.223 KK yang mendapatkan pemberdayaan ekonomi, maka capaian kinerjanya mencapai 152,89%.

### **19. Penyelenggaraan Urusan Wajib Sosial**

Urusan Wajib Sosial diimplementasikan melalui Program Penanggulangan Masalah Sosial. Program ini dimaksudkan untuk dapat meningkatkan kualitas hidup bagi penyandang masalah sosial dengan sasaran meningkatnya pelayanan bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). Pencapaian sasaran tersebut diukur dengan indikator persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang tertangani.

Jumlah PMKS yang ditangani pada tahun 2010 sebanyak 19.652 orang atau 42,34%, sehingga sampai dengan tahun 2010 menjadi sebanyak 49.415 orang. Dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan sebesar 16,20%, maka capaiannya adalah 261,36%.

### **20. Penyelenggaraan Urusan Wajib Kebudayaan dan Urusan Pilihan Pariwisata**

Urusan Wajib Kebudayaan dan Urusan Pilihan Pariwisata diimplementasikan melalui Program Peningkatan Kepariwisata dan Kebudayaan. pencapaian sasaran dari program tersebut diukur dengan menggunakan 4 (empat) indikator kinerja, yaitu:

### **1) Jumlah cagar budaya yang dilindungi**

Pada tahun 2010, sebanyak 151 bangunan dan 10 situs cagar budaya dilindungi Pemerintah Kota Surabaya. Bangunan dan situs cagar budaya yang dilindungi tersebut, tertuang dalam Surat Keputusan Walikota Surabaya Nomor: 188.45/251/402.1.04/1996 tanggal 26 September 1996 dan Nomor: 188.45/004/402.1.04/1998 tanggal 13 Januari 1998. Dengan demikian capaian kerjanya mencapai 100% dari target yang telah ditetapkan sebanyak 151 bangunan dan 10 situs.

### **2) Jumlah padepokan seni & budaya yang dibina**

Pada tahun 2010 jumlah padepokan seni dan budaya yang dibina sebanyak 162 lembaga seni, sehingga capaian kerjanya mencapai 270% dari target yang telah ditetapkan sebanyak 60 lembaga seni.

### **3) Persentase Pengembangan seni dan budaya lokal**

Pada tahun 2010, Pemerintah Kota Surabaya telah menyelenggarakan dan mengikuti 523 kegiatan seni dan budaya. Dengan demikian, persentase peningkatan jumlah penyelenggaraan seni dan budaya lokal sebesar 45,68% dari target sebesar 15% sehingga capaian kerjanya mencapai 304,53%.

### **4) Jumlah kunjungan Wisman & Wisnu**

Pada tahun 2010, jumlah wisatawan yang berkunjung ke Kota Surabaya sebanyak 7.713.801 orang, yang terdiri dari 7.544.997 wisatawan nusantara dan 168.804 wisatawan mancanegara. Dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan sebanyak 2.632.068 wisatawan nusantara dan 164.863 wisatawan mancanegara, maka capaian kerjanya mencapai 102,39% untuk kunjungan wisatawan nusantara dan 286,66% untuk kunjungan wisatawan mancanegara.

## **D. TUGAS PEMBANTUAN YANG DITERIMA**

Pada tahun 2010, Pemerintah Kota Surabaya Pemerintah Pusat melalui Direktorat Jenderal Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (KP3K) Departemen Kelautan dan Perikanan. Program Pengembangan Sumber Daya Perikanan melalui kegiatan **Pemberdayaan Ekonomi, Sosial, Budaya, Pelaku Usaha Perikanan dan Masyarakat Pesisir**. Kegiatan yang diselenggarakan meliputi pemetaan swadaya kesejahteraan masyarakat, fasilitasi kelembagaan, kegiatan sosialisasi, lokakarya, pendampingan serta pendistribusian Bantuan Langsung Masyarakat di tiga lokasi yaitu Kelurahan Tambak langon dan Kelurahan Greges Kecamatan Asemrowo serta Kelurahan Gunung Anyar Tambak Kecamatan Gunung Anyar. Pelaksana Tugas pembantuan di Pemerintah Kota Surabaya adalah Dinas Pertanian Kota Surabaya.

## **E. TUGAS UMUM PEMERINTAHAN**

### **a. Kerjasama Antar Daerah**

Dalam era otonomi terjadi proses regionalisasi yang ditandai dengan keterikatan antar daerah otonom bertetangga karena kepentingan dan ketergantungan. Sementara itu demokratisasi yang terjadi meningkatkan komunikasi, partisipasi dan pemberdayaan masyarakat yang mengakibatkan munculnya tuntutan akuntabilitas dan kualitas pelayanan. Sedangkan globalisasi yang tidak terbendung lagi membawa dampak pada dinamika perekonomian nasional dan internasional serta memunculkan kompetensi lokal, nasional dan internasional. Pemerintah Kota Surabaya telah menjalin kerjasama antar daerah dengan beberapa kota di dalam dan di luar negeri. Di dalam negeri mitra kerjasama Kota Surabaya yang telah menandatangani Kesepakatan Bersama Kerjasama Antar Daerah sampai dengan akhir tahun 2010 adalah:

1. Kabupaten Sidoarjo;
2. Kota Bandung;
3. Kota Banjarmasin;
4. Kota Batam;
5. Kota Yogyakarta;
6. Kota Padang;
7. Kabupaten Gresik;
8. Kabupaten Kotawaringin Timur.

Sementara, ada pula beberapa daerah lain yang masih dalam tahap peninjauan antara lain dengan daerah-daerah *hinterland* Kota Surabaya yaitu Kabupaten Bangkalan dan Kabupaten Pasuruan serta kota-kota lain di luar Jawa seperti Kota Denpasar, Kota Mataram dan Kota Makassar.

### **b. Kerjasama Luar Negeri**

Selain dengan kota-kota dalam negeri, Kota Surabaya juga telah memiliki beberapa sistercity di luar negeri, diantaranya:

1. Seattle (AS)
2. Busan (Korsel)
3. Kochi (Jepang)
4. Guangzhou (RRC)
5. Xiamen (RRC)
6. Varna (Bulgaria)
7. Shah Alam (Malaysia)
8. Marseille (Perancis)

Kota-kota di Luar Negeri yang masih dalam proses penjajakan antara lain Dubai (Uni Emirates Arab), Izmir (Turki) dan Johannesburg (Afrika Selatan).

### **c. Kerjasama Dengan Pihak Ketiga**

Selain melakukan kerjasama antar daerah, Pemerintah Kota Surabaya juga melakukan kerjasama dengan pihak ketiga, pihak ketiga yang diajak kerjasama dengan Pemerintah Kota Surabaya untuk tahun 2010 antara lain :

- a. UNAIR Surabaya
- b. IAIN Sunan Ampel, ITS, UNESA, dan Kopertis Wilayah VII
- c. PT. TELKOM Divre V Jawa Timur
- d. Asosiasi Masyarakat Korea
- e. PT. Intramedia Promosindo
- f. PT. ICI *Paints* Indonesia
- g. Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya, Rumah Sakit Bhayangkara Tk. II Surabaya dan PT. Jasa Raharja (Persero) Cabang Jawa Timur
- h. PT. Pelabuhan Indonesia III (Persero)
- i. SNVT Pengembangan Kawasan Pemukiman Jawa Timur

### **d. Koordinasi Dengan Instansi Vertikal**

Selama ini dalam menyelenggarakan pemerintahan di daerah, Pemerintah Kota Surabaya selalu melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat melalui instansi vertikal misalnya dalam bentuk koordinasi, pemberian pedoman oleh instansi vertikal, pemberian bimbingan, supervisi dan konsultasi oleh instansi vertikal, pemberian pendidikan dan pelatihan, serta pemantauan, evaluasi dan pengawasan oleh instansi vertikal. Koordinasi dengan instansi vertikal yang dilakukan masing-masing Unit Satuan Kerja di Pemerintah Kota Surabaya, dilakukan dengan hampir semua instansi/departemen di pemerintah pusat terkait pelaksanaan tugasnya. Misalnya dengan Kementerian Dalam Negeri Negeri, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Pendidikan, Kementerian Tenaga Kerja, BPK, BPKP, BKN dll. Ini dilakukan karena dalam menyelenggarakan pemerintahan Pemerintah Kota Surabaya tetap memerlukan bimbingan, supervisi, konsultasi dan evaluasi dari Pemerintah Pusat. Selain itu, koordinasi dalam tataran pengambilan kebijakan yang bersifat strategis dilakukan dalam forum rapat koordinasi Muspida yang melibatkan unsur-unsur pimpinan di Kota Surabaya

### **e. Pembinaan Batas Wilayah**

Pada tahun 2010 fokus pembinaan batas wilayah yang dilaksanakan Pemerintah Kota Surabaya. Kegiatan yang dilaksanakan untuk itu adalah kegiatan Penataan Batas Wilayah Kota Surabaya dimaksudkan untuk memperoleh gambaran

yang jelas mengenai batas wilayah kelurahan di kota Surabaya baik dilapangan maupun diatas peta, adapun tujuannya penetapan dan penegasan batas wilayah kelurahan adalah untuk memberikan kepastian hukum terhadap batas kelurahan yang berbatasan di Kota Surabaya, sedangkan peta wilayah bertujuan sebagai sarana untuk mendeteksi secara dini dan sebagai acuan untuk memperoleh informasi serta meningkatkan pengawasan, monitoring serta koordinasi dan sebagai dasar dalam penyelesaian masalah sengketa batas wilayah administrasi Kecamatan / Kelurahan. Kegiatan tersebut dilaksanakan pada tahun 2010 pemasangan pilar batas di 60 titik di 60 Kelurahan di 13 Kecamatan. Penyelenggaraan pembinaan batas wilayah Kota Surabaya tahun 2010 di dukung oleh APBD Kota Surabaya Tahun Anggaran 2010 pada kegiatan Penataan batas wilayah Kota Surabaya di Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Kota Surabaya.

#### **f. Pencegahan Dan Penanggulangan Bencana**

Secara Geografis Kota Surabaya tidak termasuk daerah rawan bencana karena cukup jauh dari gunung berapi aktif dan tidak dialiri oleh sungai-sungai besar sehingga sampai saat ini relatif tidak pernah terjadi bencana di Kota Surabaya. Namun demikian dalam rangka mengantisipasi kejadian bencana di Kota Surabaya diperlukan antisipasi dini dan kesiapsiagaan komponen masyarakat dan Pemerintah agar sejalan dengan semangat untuk memberikan perlindungan dan rasa aman yang layak dan bermanfaat kepada masyarakat.

Selanjutnya memperhatikan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131 Tahun 2003 tentang Pedoman Penanggulangan Bencana dan Pengungsi di Daerah, maka pelaksanaan kegiatan Penanggulangan Bencana di Kota Surabaya telah dibentuk dengan Keputusan Walikota Surabaya, yaitu : Keputusan Walikota Surabaya Nomor 188.45/65/436.1.2/2010 tentang Pembentukan Satuan Pelaksana Penanggulangan Bencana Kota Surabaya.

#### **g. Penyelenggaraan Ketentraman Dan Ketertiban Umum**

Berkaitan dengan ketentraman dan ketertiban umum dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut. Gangguan yang terjadi berupa SARA, Anarkisme, Sparatisma atau yang lainnya pada sepanjang tahun 2010 meliputi 2 kejadian yang meliputi, Masjid Radatul Falah Kelurahan Ngagel Rejo Kecamatan Wonokromo mengenai Permasalahan kas dana masjid dan Sekolah Pelangi Kristus Jl. Jemur Handayani XII No. 33 – 48 Kecamatan Wonocolo. Sedangkan untuk Gangguan Anarkisme pada tahun 2010 diklarifikasikan menjadi 3 (tiga) permasalahan yaitu Ekonomi, Politik dan sosial Budaya, dimana pada tahun 2010 terjadi permasalahan ekonomi sebanyak 57 kejadian, Politik 40 kejadian dan sosial Budaya 87 kejadian.

## **F. PENUTUP**

Capaian kinerja dari penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan yang dijelaskan dalam Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ini merupakan kerja bersama (kolektif) antara eksekutif dan legislatif, karena prosedur yang berlaku sesuai dengan norma yang telah disepakati dan dijalani bersama sebagaimana tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah Kota Surabaya. Pemerintah Kota telah mencoba memenuhi komitmen moral bahwa perbaikan kinerja yang telah dicapai akan menjadi pondasi yang proporsional dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan Kota Surabaya di masa mendatang, yang dihadapkan pada percepatan perubahan lingkungan strategis yang luar biasa. Penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan tahun 2010, merupakan kesinambungan dari penyelenggaraan kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Demikian Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2010 ini dipublikasikan untuk diketahui masyarakat. Bagi masyarakat yang ingin menyampaikan masukan, saran, pendapat dan tanggapan guna peningkatan penyelenggaraan pemerintahan, dapat menyampaikan melalui [www.surabaya.go.id](http://www.surabaya.go.id) atau melalui Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah Kota Surabaya Jl. Jimerto No 25-27 lantai V Surabaya Telepon: 031-5312144 psw. 601

Surabaya,

**WALIKOTA SURABAYA,**

**TRI RISMAHARINI**